

RESEARCH ARTICLE

JURNAL
NOMOSLECA

DINAMIKA DISKURSUS PUBLIK TERHADAP PENGGAMBARAN KEKERASAN SEKSUAL PADA FILM VINA: SEBELUM 7 HARI (2024)

Afrida Putri Eskasari¹ | R.A Vita N.P. Astuti²

¹Program Studi
Magister Ilmu Komunikasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

²Program Studi
Magister Ilmu Komunikasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Correspondence
Afrida Putri Eskasari
Email: afridaaaa7@gmail.com

[http://jurnal.unmer.ac.id/
index.php/n](http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/n)

Abstract: *The F8 Makassar Festival was organized by the Makassar City Government with the aim of transforming the city's image from one associated with demonstrations into a city known for its festivals. This study seeks to map out the communication activities that took place during the F8 Makassar Festival using a case study approach. The findings reveal that communication activities were primarily focused on publicity and were executed by the Makassar City Communications and Information Agency (Diskominfo) as the government's public relations arm. However, Diskominfo was not involved in message formulation, as its role was outside of the organizing committee. Several publicity strategies were identified, including the use of agenda-setting to construct the image of a "Festival City," leveraging the political influence of the incumbent mayor to aid publicity efforts, producing efficient content, collaborating with local and regional media, and utilizing the communication networks of the Makassar City Tourism Office (Dispar) and event organizers. No monitoring or evaluation stages were conducted, leaving the success of the city's transformation into a festival city unclear. Furthermore, the F8 Makassar Festival was not part of a deliberate PR campaign aimed at shaping the "Festival City" image.*

Keywords: *Government public relations, city branding, F8 Makassar, case study*

Abstrak: Festival F8 Makassar dilaksanakan berdasarkan keinginan Pemerintah Kota Makassar untuk mengubah citra kota yang identik dengan demonstrasi menjadi kota festival. Penelitian ini berusaha memetakan aktivitas komunikasi yang terjadi dalam pergelaran Festival F8 Makassar menggunakan metode studi kasus. Hasilnya ditemukan bahwa aktivitas komunikasi terfokus hanya pada publikasi dan dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Makassar sebagai humas pemerintah. Diskominfo Kota Makassar tidak terlibat dalam perumusan pesan karena posisinya yang berada di luar kepanitiaan. Beberapa strategi publikasi yang ditemukan adalah pemanfaatan *agenda-setting* untuk mengkonstruksi citra "Kota Festival", pemanfaatan *political influence* walikota yang menjabat untuk membantu publikasi, produksi konten yang efisien, bekerja sama dengan media lokal dan media luar daerah, dan pemanfaatan jaringan komunikasi Dispar Kota Makassar dan *event organizer*. Tidak ada tahapan *monitoring* dan *evaluating* yang terjadi, sehingga keberhasilan membentuk citra kota festival masih belum diketahui. Festival F8 Makassar juga tidak berada dalam konstelasi *PR campaign* yang sengaja digagas untuk membentuk citra "Kota Festival".



Kata Kunci: *Humas pemerintah, city branding, F8 Makassar, studi kasus*

1 | PENDAHULUAN

Fenomena dinamika diskursus publik tercermin dalam interaksi antar berbagai pihak di ruang publik yaitu pemikiran, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap suatu isu terus dibentuk dan berubah (Salahuddin, 2024). Dinamika ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif serta ketidakstabilan respons sosial yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, latar belakang sosial budaya, serta kepentingan ekonomi dan politik (Salahuddin, 2024). Dalam prosesnya, sering muncul persoalan seperti konflik, miskomunikasi, hingga dominasi narasi tertentu yang menghambat tercapainya pemahaman bersama (Salahuddin, 2024). Selain itu, ketidaksetaraan akses dan keterlibatan dalam diskursus publik juga menjadi masalah serius, ditambah dengan maraknya disinformasi dan berita palsu yang memengaruhi cara pandang masyarakat (Fuchs, 2021). Data menunjukkan bahwa 30–60% masyarakat Indonesia masih terpapar hoaks saat mengakses informasi digital, sementara hanya sebagian kecil yang mampu membedakan informasi yang benar (Cahyadi, 2021). Permasalahan ini kerap dipicu oleh penggambaran media yang tidak sesuai dengan realitas, di mana media sering mereproduksi konten sensasional dan memperkuat stereotip gender (McCombs & Valenzuela, 2020). Penelitian *PLAN International dan Geena Davis Institute on Gender in Media* (2019) menyebutkan bahwa lebih dari 85% perempuan dalam film kerap digambarkan sebagai korban kekerasan seksual. Sementara penelitian lain menemukan kecenderungan media menampilkan perempuan sebagai korban dan pria sebagai pelaku, yang secara tidak langsung membentuk opini publik dan dianggap wajar oleh sebagian masyarakat (Karupiah., et al, 2020)

Isu kekerasan seksual sendiri masih menjadi persoalan yang sangat krusial di Indonesia. Data Komnas Perempuan 2023 mencatat bahwa dari 4.371 kasus kekerasan yang dilaporkan, sebanyak 2.228 merupakan kasus kekerasan seksual, menandai peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Penggambaran kekerasan seksual yang tidak tepat dalam film atau media kerap menimbulkan perdebatan di ruang publik, karena membentuk opini masyarakat serta menciptakan ketidakpastian dalam memahami isu-isu sensitif tersebut. Di era digital saat ini, diskursus publik tentang kekerasan seksual dalam film menjadi semakin kompleks (Andina, 2023). Masyarakat semakin kritis menghadapi beragam perspektif terhadap isu ini, sementara media massa, khususnya film memiliki peran besar dalam membentuk opini publik serta menciptakan diskursus sosial (Tannen, et al., 2015). Sebagai medium komunikasi visual, film menyajikan narasi tentang realitas sosial yang seringkali lebih mudah dipahami masyarakat luas. Namun, penggambaran kekerasan seksual dalam film kerap memicu perdebatan etis dan moral, baik dari sudut pandang kesadaran sosial maupun dari potensi eksploitasi trauma korban (Bordwell & Thompson, 2019).

Perkembangan media sosial seperti X, Instagram, Facebook, dan TikTok memperluas akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskursus publik. *Platform-platform* ini tidak hanya berfungsi sebagai media berbagi informasi, tetapi juga ruang diskusi yang menghadirkan berbagai perspektif terkait isu sosial (Papacharissi, 2015). Namun, dinamika diskursus publik di media sosial juga diwarnai oleh algoritma yang lebih memprioritaskan konten viral dan kontroversial, serta kemunculan fenomena *buzzer* yang dapat menggiring opini publik secara sepihak (Sunstein, 2018). Praktik *buzzing* ini sering digunakan untuk kepentingan tertentu yang tidak jarang memperkeruh diskursus yang seharusnya kritis dan mendalam. Akibatnya, diskursus publik mengenai isu penting seperti kekerasan seksual dalam film justru lebih banyak diwarnai oleh konten emosional dan sensasional ketimbang analisis yang etis dan berperspektif korban (Hargens, 2021). Polarisasi opini, penyebaran disinformasi, dan terciptanya *echo chamber* di media sosial membuat diskursus publik rentan kehilangan substansi, di mana publik lebih sibuk memperdebatkan kelayakan tayangan film daripada membicarakan dampak sosialnya terhadap korban dan masyarakat secara luas (Arora., et al, 2022; Effendy et al., 2024; Kurniawan et al., 2022).

Sejumlah film lokal dan internasional pernah memantik diskursus publik tentang

penggambaran kekerasan seksual di layar lebar (Caputi, 2019). Film seperti *Hope* (2013) di Korea Selatan mampu menggugah empati publik dengan menyoroti dampak kekerasan seksual terhadap anak dan keluarga korban. Film dokumenter seperti *The Hunting Ground* (2015) dan *Audrie and Daisy* (2016) di Amerika Serikat berhasil mengangkat isu pelecehan seksual di kampus serta ketidakadilan sistemik yang dihadapi korban. Di Indonesia, film *Like & Share* (2022) menghadirkan isu kekerasan seksual di era digital, menyoroti bagaimana trauma korban diperburuk melalui pelecehan di media sosial. Film-film tersebut menunjukkan bahwa diskursus tentang kekerasan seksual dalam film tidak hanya menyangkut soal estetika atau hiburan semata, melainkan berkaitan erat dengan etika sosial, moralitas, dan keberpihakan terhadap korban.

Pada 2024, film horor berjudul *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) menjadi sorotan publik karena penggambaran eksplisit kekerasan seksual di dalamnya (Pertiwi, 2024). Film ini memicu perdebatan luas di media sosial dan ruang-ruang diskusi digital lainnya (Pertiwi, 2024). Sebagian kreator film dan kritikus memuji keberanian film tersebut dalam mengangkat isu kekerasan seksual, sementara sebagian masyarakat mengecamnya karena dinilai mengeksploitasi trauma korban demi kepentingan komersial (BBC, 2024). Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas dinamika diskursus publik di era digital, di mana perbedaan pandangan terka etika penggambaran dan dampak sosial dari tayangan tersebut menjadi perbincangan terbuka. Situasi ini menunjukkan bahwa media, khususnya film, memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi publik dan memengaruhi cara masyarakat memandang isu kekerasan seksual (Schwark, 2017).

Penelitian ini mengkaji dinamika diskursus publik terhadap penggambaran kekerasan seksual dalam film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024). Penelitian ini berfokus pada bagaimana diskursus publik terbentuk di media sosial serta isu-isu apa saja yang menjadi sorotan publik dalam menyikapi film tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika diskursus publik terjadi terkait penggambaran kekerasan seksual dalam film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika diskursus publik yang muncul sebagai respons terhadap penggambaran kekerasan seksual dalam film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) dengan memperhatikan pandangan audiens.

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam studi diskursus publik, media, dan penggambaran kekerasan seksual di film. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi sineas, pelaku industri media, akademisi, serta pengambil kebijakan agar lebih berhati-hati dalam menggambarkan isu kekerasan seksual di ruang publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya etika media dan keberpihakan terhadap korban dalam setiap narasi yang dihadirkan.

Devasundaram dan Barn (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa film dapat membentuk diskursus luas tentang kekerasan berbasis gender serta berperan sebagai alat penyampai ketidakadilan. Mereka menganalisis film dokumenter *India's Daughter* dan film fiksi *Anatomy of Violence*, yang memperlihatkan bagaimana budaya pemerkosaan direproduksi melalui media visual. Penelitian ini menunjukkan bahwa identitas gender dan perilaku seksual merupakan hasil konstruksi norma sosial, bukan sesuatu yang alamiah. Namun, penelitian ini belum mengkaji bagaimana penonton dari berbagai latar sosial-budaya merespons narasi kekerasan seksual dalam film.

Karupiah et al. (2020) melakukan studi terhadap persepsi penonton Malaysia India terhadap kekerasan seksual dalam film Tamil. Hasilnya, mayoritas penonton memahami kekerasan seksual sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Meski demikian, variasi pemahaman tetap muncul dipengaruhi oleh faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, agama, dan pendidikan (Studzińska, 2015). Penelitian ini belum mengeksplorasi secara rinci respons publik berdasarkan keragaman demografis.

Di Indonesia, Razali dan Oktaviana (2023) meneliti film *Penyalin Cahaya* (2021) yang memanfaatkan pendekatan feminis radikal dan kognisi sosial dalam menyampaikan isu

kekerasan seksual. Film ini berpotensi meningkatkan kesadaran dan empati masyarakat terhadap korban. Meskipun demikian, penelitian ini hanya berfokus pada representasi feminisme radikal tanpa menelaah respons penonton. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa film memiliki peran penting dalam membentuk diskursus publik dan persepsi terhadap kekerasan seksual, sekaligus mengungkap pentingnya penelitian lanjutan yang mencermati respons audiens dari berbagai latar sosial dan budaya.

Penelitian ini menggunakan teori diskursus publik yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas untuk memahami dinamika perbincangan publik, khususnya di media sosial. Jurgen Habermas (1989) mendefinisikan diskursus publik sebagai proses pertimbangan rasional di ruang publik di mana setiap individu memiliki kesempatan setara untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai isu-isu sosial. Dalam konteks media sosial, teori ini membantu memahami bagaimana ruang digital menjadi wadah baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan, berdebat, dan membentuk opini kolektif terhadap suatu isu. Enam konsep utama Habermas, yaitu ruang publik, tindakan komunikatif, diskursus rasional, *ideal speech situation*, dominasi, dan konsensus menjadi dasar untuk menelaah dinamika komunikasi digital yang sarat relasi kuasa. Contoh empiris tentang enam konsep Habermas bisa ditemukan pada komentar di akun Instagram @narasinewsroom dalam konten tanggal 29 Agustus 2025 tentang Affan Kurniawan yang disukai 321.000 akun dan mendapatkan sejumlah 10.700 komentar (per 7 November 2025). Postingan tersebut menunjukkan berbagai reaksi pengguna akun, dari ucapan duka cita sampai pada pemberian opini terhadap kepolisian dan pemerintah. Konsep *ideal speech situation* terbangun dengan adanya kebebasan berkomentar. Hanya saja, dominasi dihasilkan karena adanya algoritma yang menyorot komentar dengan banyak *likes*. Konsensus terbentuk ketika sebagian besar pengguna merespon satu komentar dari akun @hoerakhaw: "Kalian percaya polisi menangkap polisi?" yang mendapat 284 tanggapan seragam bahwa mereka tidak percaya polisi. Konsep tindakan komunikatif bisa dilihat pada akun TikTok @bbcnewsindonesia tentang warga Baduy yang ditolak oleh rumah sakit. Salah satu komentarnya adalah "Saya ingin tanya, Rumah Sakit mana yang menolak? Kenapa tidak disebutkan di berita ini?" (akun @hasmelia71) yang mendapat dua tanggapan. Diskursus rasional sangat kuat dalam postingan di media sosial pada masa pandemi dengan adanya akun-akun yang berbagi informasi kesehatan dan berdiskusi berdasarkan pengalaman terbaik dan data yang kredibel.

Dalam *digital public sphere*, diskursus tidak selalu rasional dan netral sebagaimana diasumsikan Habermas. Seperti yang diungkapkan oleh Papacharissi (2015) dengan konsep *affective publics*, yang menjelaskan bahwa partisipasi daring juga digerakkan oleh emosi, keterhubungan afektif dan ekspresi personal. Ruang publik yang seharusnya terbebas dari dominasi sering kali terganggu oleh algoritma dan pengaruh pihak berkuasa seperti *buzzer* atau *influencer*. Akibatnya, tindakan komunikatif dan *ideal speech situation* jarang tercapai karena interaksi komentar lebih sering diwarnai pelepasan emosi, strategi, dan ketimpangan partisipasi. Meski demikian, ruang digital tetap memungkinkan munculnya konsensus, misalnya kesadaran kolektif akan pentingnya membicarakan isu kekerasan seksual secara empatik dan reflektif.

Seiring berkembangnya teknologi, media sosial menggeser peran ruang publik tradisional menjadi ruang diskursus digital. Menurut Fuchs (2015), digitalisasi media mengubah dinamika diskursus publik karena algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten emosional dan kontroversial, yang berpotensi memicu polarisasi opini. Media sosial kini bukan hanya sarana berbagi informasi, tetapi juga arena pembentukan opini dan identitas sosial (Carr & Hayes, 2015).

Kekerasan seksual adalah tindakan seksual tanpa persetujuan yang berdampak fisik dan psikologis bagi korban (WHO, 2012). Bentuknya mencakup kekerasan verbal berupa kata-kata merendahkan atau ancaman, serta kekerasan fisik seperti pemaksaan hubungan seksual atau sentuhan tidak diinginkan. Dalam komunikasi, kekerasan seksual diperkuat lewat media dan diskursus publik (Medvi & Sahminan, 2024). Konsep-konsep penting dalam analisis ini

meliputi *rape culture* yang menormalisasi kekerasan seksual (Powell & Henry, 2017), *victim blaming* yang menyalahkan korban (Adolfsson, 2018), *gender power* sebagai ketimpangan kekuasaan gender (Foucault, 2019), *objectification* yang merendahkan manusia menjadi objek (Vance et al., 2015), dan *consent* sebagai persetujuan sadar dalam aktivitas seksual (Popova, 2019). Sebagaimana dijelaskan oleh Gill (2008) bahwa media tetap seksis dengan bersembunyi di belakang pemberdayaan perempuan namun masih terus mengatur tentang tubuh dan moral perempuan. Demikian juga Lazar (2014), memakai *feminist critical discourse analysis* (FCDA), menemukan praktik patriarki dan seksisme dalam bentuk lain yang ada di berbagai komunitas dan konteks sosial.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan teori diskursus publik Habermas dalam konteks diskursus media sosial Indonesia terkait isu kekerasan seksual di film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024). Berbeda dari studi sebelumnya yang lebih menyoroti ruang publik konvensional, penelitian ini mengkaji bagaimana ruang publik digital bekerja dalam membentuk diskursus sosial, melihat relasi kekuasaan, dan opini di media sosial Indonesia. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana opini publik terbentuk dalam konteks kontemporer. Penelitian sebelumnya pada film tentang isu *digital sphere*, seperti penelitian pada film *Penyalin Cahaya* (2021), menunjukkan mayoritas pada isu-isu sosial, misalnya pelecehan seksual (Tuhepaly & Mazaid, 2022; Permatasari & Amalia, 2022). Penelitian pada film *Like & Share* (2022) cenderung berfokus pada perspektif feminis radikal tanpa menelaah dinamika diskursus dan pandangan masyarakat luas terhadap isu kekerasan seksual di ruang publik digital.

2 | METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif dalam ranah ilmu komunikasi, khususnya kajian diskursus media dan budaya populer. Bahan penelitian terdiri dari film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) serta komentar pengguna media sosial. Alat penelitian berupa catatan analisis film dan dokumentasi data digital dari media sosial. Lokasi penelitian dilakukan secara daring melalui dua *platform* digital tersebut. Waktu penelitian berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2024, mencakup periode sebelum, selama, dan sesudah penayangan film di bioskop. Sifat penelitian ini kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan, mengidentifikasi, dan menganalisis dinamika diskursus publik terkait isu kekerasan seksual dalam film.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menonton film secara menyeluruh dan mencatat adegan, dialog, serta elemen visual terkait kekerasan seksual. Selain itu, data media sosial diperoleh melalui teknik *purposive sampling*, yaitu memilih komentar relevan yang membahas penggambaran kekerasan seksual, baik yang bersifat pro, kontra, maupun netral, serta komentar yang mendapat respons dari pengguna lain. *Platform* media sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah Instagram dan TikTok karena keduanya memiliki pola diskusi yang dinamis terhadap isu-isu viral. Sumber data diambil dari akun resmi film @filmvina.sebelum7hari dan akun rumah produksi @deecompanyofficial, yang dipilih berdasarkan otoritasnya dalam menyebarkan informasi serta membentuk diskursus publik terkait film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) dengan jumlah 623 komentar. Sehingga komentar yang dikumpulkan menggambarkan tanggapan langsung audiens terhadap narasi yang disajikan oleh pembuat film.

Teknik analisis data melalui tiga tahapan analisis tematik, yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* (Strauss & Corbin, 1998). Pada tahap *open coding*, peneliti membaca seluruh komentar publik di media sosial secara berulang untuk mengidentifikasi makna dan memberi kode awal seperti “menyalahkan korban” atau “mengobjektifikasi tubuh perempuan.” Selanjutnya, pada tahap *axial coding*, kode-kode dengan makna serupa dikelompokkan menjadi kategori yang lebih luas, seperti “narasi yang menormalisasi kekerasan,” “komentar yang memojokkan korban,” dan “kritik terhadap ketimpangan gender.” Tahap akhir, *selective coding*, menghasilkan empat tema utama yang menggambarkan

dinamika diskursus publik terhadap penggambaran kekerasan seksual dalam film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024), yaitu *rape culture*, *victim blaming*, *objectification*, dan *gender power*. Keempat tema ini menunjukkan bagaimana komentar audiens merefleksikan pandangan sosial dan ideologis terhadap isu kekerasan seksual serta ketimpangan gender dalam ruang publik digital.

3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis penggambaran kekerasan seksual dalam film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) serta dinamika diskursus publik di media sosial, khususnya Instagram dan TikTok. Secara umum, film ini mengangkat kisah nyata kekerasan seksual yang dibalut dalam genre horor dengan dominasi *tone* warna gelap seperti hitam, merah, dan coklat, yang secara simbolik berkaitan dengan makna kematian, misteri, dan kekerasan (Effendy et al., 2022).

Penggambaran Kekerasan Seksual pada Film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024)

Melalui analisis isi terhadap adegan-adegan eksplisit kekerasan seksual, ditemukan beberapa kategori temuan utama yaitu *rape culture*, *victim blaming*, *consent*, *gender power*, *objectification*, serta kekerasan verbal dan fisik. Pada *scene* pertama, ditampilkan adegan pemerkosaan terhadap Vina yang dilakukan sekelompok laki-laki tanpa rasa takut terhadap konsekuensi, memperlihatkan dominasi fisik dan sikap pelaku yang meremehkan korban. Hal ini sejalan dengan konsep *rape culture* yang dijelaskan oleh Powell & Henry (2017) di mana kekerasan seksual sering dinormalisasi dalam budaya populer, bahkan pelaku merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakan mereka.

Adegan pada *scene* pertama menunjukkan korban dalam posisi salah atau pantas menerima kekerasan, sebagaimana dikritisi oleh Adolfsson (2018) yang menyatakan bahwa media kerap menggambarkan korban kekerasan seksual sebagai pihak lemah dan tak berdaya. Tidak adanya persetujuan korban (*consent*) dan pemaksaan fisik menandakan pelanggaran hak asasi yang serius, sesuai dengan konsep yang diangkat oleh Popova (2019) bahwa kekerasan seksual terjadi ketika relasi kuasa digunakan untuk mengontrol tubuh dan kehendak korban.

Selain itu, dominasi pelaku laki-laki atas korban perempuan memperlihatkan relasi kuasa gender, sejalan dengan teori Foucault (2019) tentang kekuasaan dan tubuh di mana tubuh perempuan menjadi objek dominasi dalam sistem patriarki. Pengobjektifan tubuh korban sebagai alat pemuas nafsu tanpa penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, seperti yang tampak dalam tindakan meludahi dan menarik rambut korban, memperkuat konsep *objectification* yang dikemukakan oleh Vance et al (2015).

Pada *scene* kedua, ditemukan kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Pelaku terus menikmati penderitaan korban tanpa rasa bersalah. Ekspresi tersebut mencerminkan *rape culture* yang semakin kuat di mana kekerasan seksual dianggap wajar atau bahkan hiburan dalam media horor. Meskipun tidak ada narasi eksplisit yang menyalahkan korban, penggambaran ketidakberdayaan Vina berpotensi memperkuat persepsi publik bahwa korban kekerasan seksual selalu berada dalam posisi pasif dan tidak mampu melawan. Peran media dalam membentuk persepsi bias terhadap korban kekerasan seksual.

Diskursus Publik pada Platform Instagram dan Tiktok

Film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) menghadirkan isu kekerasan seksual ke ruang publik digital melalui platform Instagram dan TikTok. Respon publik terhadap film ini menunjukkan diskursus yang kompleks, mulai dari kritik terhadap eksploitasi visual hingga dukungan atas

nilai edukasi film. Media sosial berperan sebagai ruang publik digital di mana individu saling bertukar pandangan, memperdebatkan isu, dan membentuk narasi kolektif tentang kekerasan seksual (Fuchs, 2021).

Mengacu pada teori diskursus publik Habermas (1989) dan konsep ruang publik digital Papacharissi (2015), percakapan dalam kolom komentar bukan sekadar reaksi spontan, melainkan bagian dari pembentukan opini publik yang menunjukkan adanya tindakan komunikatif, dominasi, konsensus, serta ketegangan dalam membahas isu sensitif. Analisis dilakukan terhadap komentar-komentar di akun Instagram resmi film @filmvina sebelum 7 hari dan TikTok @deecompanyofficial, pada periode Mei–September 2024. Komentar yang dipilih ialah yang memicu respons lanjutan dari pengguna lain.

Tabel 1. Kategori Komentar

No	Contoh Komentar	Keterangan
1	@fajarizkie (Kritik): "5 juta orang menyaksikan penyiksaan dan kekerasan seksual yang dialami almarhumah dan difilmkan. Heran sama yang masih ngebela film ini. Sexual abuse dipertontonkan dengan jelas tapi masih dibela?"	Mengkritik eksploitasi kekerasan seksual dalam film serta mempertanyakan tujuan produksi.
2	@mas_debe89 (Dukungan): "Mau dilecehin kek mau apa kek, intinya pelajaran dari film ini adalah menyentil kinerja polisi, masa iya 2016-2024 pelaku utama kaga bisa ketangkap?"	Mendukung film sebagai sarana kritik terhadap kepolisian dan keadilan yang belum ditegakkan.
3	@sintarenata (Netral): "Kebayang ekspresinya fahad terus."	Komentar ini bersifat netral karena hanya mendeskripsikan pengalaman tanpa memberikan penilaian positif atau negatif, seperti dalam dialog "Kebayang ekspresinya Fahad terus." yang kemudian ditanggapi dengan "Kok sama." dan tanpa memicu perdebatan atau opini yang tajam.

(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Dari hasil analisis, ditemukan tiga kategori respons publik: kritik, dukungan, dan netral. Kritik terutama muncul terhadap eksplisitas adegan kekerasan seksual, potensi eksploitasi korban, dan ketidaksensitifan penyampaian isu. Sebaliknya, dukungan datang dari audiens yang menilai film ini sebagai sarana edukasi dan kritik sosial terhadap institusi penegak hukum. Sementara itu, komentar netral lebih banyak bersifat observasi personal terhadap akting atau alur cerita tanpa menyinggung isu utama.

Rape Culture dalam Diskursus Publik pada Media Sosial Instagram dan TikTok

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskursus publik di Instagram dan TikTok tentang film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) masih melanggengkan budaya pemerkosaan (*rape culture*), di mana kekerasan seksual dinormalisasi dan dijadikan bahan candaan. Di Instagram, sebagian komentar bersifat kritis, namun tetap dihadapkan pada opini yang menjadikan kekerasan seksual sebagai hiburan. Di TikTok, film ini diposisikan sebagai media moralitas untuk membatasi perempuan, daripada membahas kekerasan seksual sebagai persoalan sosial.

Tabel 2. Hasil Temuan Rape Culture pada Instagram dan TikTok

No	Platform	Komentar Primer	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi
1	Instagram	@egg.ptr: "Yang gw sayangin, pas adegan vina diperkosa malah banyak yang ketawa, pada bangsat semua."	Menunjukkan kritik terhadap normalisasi kekerasan seksual sebagai bahan candaan, mengarah pada kesadaran bersama bahwa hal ini harus diubah dalam masyarakat.	Menyoroti bahwa adanya kesadaran akan kesalahan budaya yang menganggap kekerasan seksual sebagai humor yang perlu diubah melalui dialog publik
		Komentar Sekunder	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi
		@abangpuji: "Ketawa lihat ekspresinya cowok ketiga itu sih lebih tepatnya, ekspresinya bikin ngakak."	Menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam diskursus publik, di mana sebagian masih melihat kekerasan seksual sebagai unsur hiburan dan bukan isu yang harus dibicarakan secara serius.	Diskursus publik menunjukkan adanya polarisasi opini di mana sebagian belum bisa memisahkan humor dengan masalah kekerasan seksual.
2	TikTok	@bolonemase: "Film ini positifnya mencegah anak perempuan ikut pergaulan bebas dan salah milih teman."	Komentar ini menunjukkan adanya dukungan untuk film karena mampu mencegah tindakan kekerasan seksual.	Dengan mendukung film ini, audiens justru melanggengkan budaya pemerkosan dengan alasan untuk edukasi.
		Komentar Sekunder	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi
		@septi_wang: "Bagi yg boikot. Heiiii!! Bayangin kalau vina itu adek lu, kk lu, anak lu, keponakan elu."	Kritik terhadap boikot film dengan pendekatan emosional, menekankan urgensi keadilan dan rasa empati dalam diskursus publik.	Komentar ini membangun narasi bahwa menonton film adalah bentuk kepedulian terhadap korban dan pengungkapan kasus, serta mengkritik mereka yang memboikot. Mencerminkan dukungan bahwa adegan pemerkosaan bukan hal yang penting.

(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Temuan ini sejalan dengan Powell & Henry (2017) yang menyatakan bahwa *rape culture* hadir dalam berbagai bentuk normalisasi kekerasan seksual di ruang publik. Selain itu, sesuai analisis Mears (2023), kapitalisme digital turut memperkuat situasi ini dengan memprioritaskan viralitas ketimbang edukasi. Dalam perspektif Habermas (1989), kondisi ini menunjukkan ruang publik digital belum mencapai *ideal speech situation*. Meskipun ada segelintir suara kritis yang berusaha menantang budaya ini, posisi mereka masih terpinggirkan di tengah komentar yang meremehkan isu kekerasan seksual, misalnya adegan pemerkosaan tidak dianggap serius atau penting. Situasi ini menjadi cerminan bahwa ruang publik digital Indonesia belum sepenuhnya berpihak pada keadilan sosial dan keberpihakan terhadap korban, melainkan masih diwarnai oleh ketimpangan kuasa dan logika kapitalisme media yang mengejar popularitas semata.

Victim Blaming dalam Diskursus Publik pada Media Sosial Instagram dan TikTok

Hasil menunjukkan bahwa diskursus publik di Instagram dan TikTok terkait film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) masih adanya praktik *victim blaming*. Beberapa komentar menyalahkan korban dengan imbauan agar remaja perempuan lebih “mawas diri” dan menyalahkan faktor eksternal seperti pergaulan dan pengawasan orang tua. Temuan ini sejalan dengan Adolffsson (2018) yang menyebut *victim blaming* sebagai kecenderungan menyalahkan korban atas kekerasan yang menimpanya. Di TikTok, diskursus serupa muncul, di mana beberapa komentar menyoroti perasaan pelaku atau tindakan korban sebagai alasan pembenaran kekerasan. Hal ini memperlihatkan bahwa narasi publik masih bias dan cenderung mengalihkan tanggung jawab dari pelaku.

Tabel 3. Hasil Temuan *Victim Blaming* pada Instagram dan TikTok

No	Platform	Komentar Primer	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi
1	Instagram	@mutiara.rma: “Edukasi juga buat remaja terutama perempuan agar lebih bisa mawas diri. Kalau gak gini, polisi gak kerja.”	Diskursus tentang manfaat penggambaran kekerasan seksual dalam film media untuk edukasi dan penyadaran masyarakat, termasuk tekanan sosial terhadap aparat hukum.	Adanya kata “mawas diri”, yang mengarah pada <i>victim blaming</i> , karena menempatkan tanggung jawab pada calon korban untuk menghindari kekerasan seksual, bukan pada pelaku untuk tidak melakukan kekerasan.
		Komentar Sekunder	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi
		@Ardy_Avihar: “Iya film ini bagus untuk para orang tua agar lebih mengawasi jam main anak2nya karena seperti itulah pergaulan yg salah di luar sana.. its real.”	Diskursus publik menunjukkan adanya kecenderungan menyalahkan faktor eksternal seperti gaya hidup atau pengawasan keluarga, daripada menyoroti kejahatan dan tanggung jawab pelaku.	Komentar ini secara tidak langsung menyiratkan bahwa kekerasan seksual terjadi akibat “pergaulan yang salah” dan kurangnya pengawasan orang tua yang berpotensi mengalihkan tanggung jawab dari pelaku ke korban atau lingkungannya.

No	Platform	Komentar Primer	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi
2	TikTok	@defan_gidara: "Turut prihatin atas kejadian Vina. Tapi disini gua sebagai cowok juga sakit hati klo di posisi itu cowok."	Diskursus publik yang terbentuk menunjukkan kecenderungan untuk lebih mengutamakan perspektif pelaku daripada korban sehingga mengarah pada bentuk <i>victim blaming</i> .	Komentar ini memperlihatkan bahwa dalam beberapa kasus perhatian lebih diberikan pada perasaan atau perspektif pelaku daripada korban kekerasan seksual.
		Komentar Sekunder	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi
		@feb: "Iya kan Vina juga ngeludah di awal."	Diskursus publik terbentuk di mana komentar ini mencoba untuk membenarkan kekerasan seksual dengan menunjuk tindakan korban yang dianggap kurang sopan atau salah.	Komentar ini menunjukkan pola <i>victim blaming</i> dengan memfokuskan perhatian pada tindakan korban yang dianggap sebagai alasan untuk membenarkan kekerasan yang diterimanya.

(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Menurut Habermas (1989), diskursus publik yang terjadi dalam konteks ini belum mencapai diskursus rasional. Diskursus rasional menuntut adanya ruang komunikasi yang bebas dari dominasi, di mana argumen dapat dipertukarkan secara setara dan didasarkan pada kepentingan bersama, bukan prasangka sosial (Habermas, 1989). Namun, diskursus publik tentang film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) masih didominasi oleh narasi-narasi yang membenarkan tindakan menyalahkan korban serta mempertahankan norma patriarkal yang bias. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ruang publik digital di Indonesia masih rentan terhadap bias sosial yang memperlemah posisi korban dan memperkuat budaya kekerasan seksual.

Objectification dalam Diskursus Publik pada Media Sosial Instagram dan TikTok

Penelitian ini menemukan bahwa objektifikasi dalam diskursus publik media sosial terkait *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) muncul melalui komentar yang mengeksploitasi tubuh korban dan menjadikan kekerasan seksual sebagai hiburan. Di Instagram, diskursus didominasi kritik terhadap penggambaran korban sebagai objek komersial, sementara di TikTok muncul komentar yang menjadikan aktor film sebagai objek seksual melalui candaan dan fantasi.

Tabel 4. Hasil Temuan *objectification* pada Instagram dan TikTok

No	Platform	Komentar Primer	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi
1	Instagram	@a.uretha: "Sebetulnya lebih baik kalo dijadiin dokumenter aja"	Diskursus publik menunjukkan keprihatinan bahwa format horor dianggap	Komentar ini menilai bahwa menjadikan kisah kekerasan seksual sebagai film



ketimbang jadi film horor begini. Jatuhnya dieksploitasi ketimbang eksplorasi."	tidak etis dalam mengangkat kekerasan seksual. Audiens mengusulkan format dokumenter sebagai alternatif. Komentar ini menunjukkan adanya objektifikasi karena mengkritik bagaimana kisah korban digunakan untuk kepentingan komersial, tanpa memperhatikan dampak etis.	horor lebih cenderung mengeksploitasi isu daripada mengeksplorasi maknanya secara mendalam.
---	---	---

Komentar Sekunder	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi
@syaaahhhh96_: "Iya bener apalagi ada adegan dewasanya, banyak anak-anak yang menonton, begitulah budaya Indonesia apa-apa dijadikan film dieksploitasi."	Balasan komentar ini membenarkan komentar di atas dan diskursus publik berfokus pada persoalan eksploitasi dalam sebuah film, dampaknya terhadap anak-anak dan minimnya edukasi atau pengawasan etis dari pembuat film. Sehingga, komentar ini mengkritisi adanya objektifikasi yang dilakukan oleh pembuat film.	Komentar ini menyoroti dampak budaya eksploitasi pada industri film Indonesia, khususnya terkait penggambaran kekerasan seksual secara tidak etis.

No	Platform	Komentar Primer	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi
2	TikTok	@nat: "gue pikir beneran si nayla yg di bawah, menang banyak tuh kayu."	Komentar ini mencerminkan perasaan bahwa adegan kekerasan seksual bisa dianggap nyata atau sebagai hiburan.	Objektifikasi kepada salah satu pemeran film, yang menganggap bahwa aktor tersebut menikmati adegan kekerasan seksual.

Komentar Sekunder 1	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi
@ziahh: "iri sama kayu."	Menjadikannya objek lelucon atau fantasi yang berbahaya dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap isu kekerasan seksual.	Memperlihatkan bagaimana kekerasan seksual dan eksploitasi korban bisa dianggap sebagai sesuatu yang lucu atau diperebutkan yang memperburuk

Komentar Sekunder 2	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi
@sinta renata: "Kebayang ekspresinya fahad terus."	Menunjukkan bagaimana aktor dalam adegan kekerasan seksual dipandang sebagai objek seksual.	norma sosial seputar kekerasan seksual. Mencerminkan normalisasi objekifikasi dalam media di mana karakter dalam adegan kekerasan seksual dianggap sebagai objek daya tarik seksual.

(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Temuan ini menguatkan teori Vance, et al. (2015) tentang objektifikasi di media, serta sejalan dengan Indainanto (2020) yang menyebut normalisasi kekerasan seksual di ruang publik memperburuk ketimpangan representasi korban. Dalam kerangka teori diskursus publik Habermas (1989), terlihat ketimpangan akses dan dominasi industri hiburan dalam membentuk narasi, sementara posisi korban tetap terpinggirkan. Meskipun sebagian audiens mengkritik, budaya sensasi dan kapitalisme media menjadi penghambat terciptanya diskursus publik yang etis dan setara.

Gender Power dalam Diskursus Publik pada Media Sosial Instagram dan TikTok

Analisis komentar di Instagram dan TikTok mengungkapkan dominasi kekuasaan gender dalam industri film, di mana produser memiliki pengaruh besar dalam membentuk narasi kekerasan seksual yang sering kali mengeksploitasi perempuan sebagai objek penderitaan atau sensasi (Krijnen & Bauwel, 2021). Komentar audiens mencerminkan ketidakpercayaan terhadap produser yang memiliki rekam jejak kurang sensitif dalam mengangkat isu kekerasan seksual, memperlihatkan kekhawatiran akan eksploitasi isu ini demi kepentingan komersial.

Tabel 5. Hasil Temuan Gender Power pada Instagram dan TikTok

No	Platform	Komentar Primer	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi
1	Instagram	@mursid.purnomo: "Tadi nonton film Furiosa, pas keluar bioskop ga sengaja denger mbak-mbak menceritakan adegan pemerkosaan, bisa-bisanya adegan itu dibuat."	Komentar mengkritik penggambaran pemerkosaan dalam film yang dianggap tidak perlu dan berisiko mengeksploitasi isu sensitif.	Komentar ini menunjukkan bagaimana industri film, sebagai bagian dari struktur yang memiliki kekuasaan. Sehingga dengan mudah mengeksploitasi pengalaman individu untuk kepentingan komersial.
		Komentar Sekunder	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi
		@winterinnight_: "Soalnya itu produser punya track record"	Diskursus publik menunjukkan keprihatinan terhadap	Komentar ini mengaitkan rekam jejak produser dengan

pernah buat film Dendam Pocong Mupeng, Hantu Binal Jembatan Semanggi, dan Pelukan Janda Hantu Gerondong."	pengaruh kreator film yang dianggap tidak kompeten atau kurang menghormati isu sensitif. Audiens mempertanyakan kapasitas produser dalam menggambarkan kekerasan seksual secara etis.	kualitas film yang membahas kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan kritik terhadap pendekatan produser yang dianggap kurang sensitif dalam menangani isu-isu serius seperti kekerasan seksual.
---	---	--

(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Temuan ini sejalan dengan Layman (2020) yang menyatakan media sering memperkuat ketidakadilan gender melalui penggambaran yang tidak adil dan stereotipikal. Dalam teori diskursus publik Habermas (1989), dominasi produser dan industri film ini menghambat terciptanya ruang diskursus yang ideal, di mana komunikasi berlangsung bebas dan setara tanpa adanya dominasi kekuasaan. Kondisi ini mencerminkan hegemoni kultural, di mana produser tidak hanya menguasai aspek ekonomi, tetapi juga mengarahkan makna sosial yang diterima publik. Dalam era kapitalisme digital, dominasi ini semakin menguat karena wacana di media sosial turut dipengaruhi oleh algoritma dan kepentingan komersial, sehingga ruang diskursus publik yang ideal menurut Habermas menjadi terdistorsi oleh kekuatan ekonomi dan teknologi. Struktur kekuasaan media yang kuat memperburuk ketimpangan penggambaran kekerasan seksual dan membatasi partisipasi suara alternatif dalam diskursus publik. Meskipun kritik publik terhadap ketimpangan gender semakin nyata, kontrol media dan kapitalisme hiburan tetap menjadi penghalang utama dalam menciptakan narasi yang adil dan kesetaraan dalam pemahaman isu kekerasan seksual.

Dinamika Diskursus Publik

Tabel 6. Hasil Temuan yang Menunjukkan adanya Dinamika Diskursus Publik

No	Platform	Komentar Primer	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi
1	Instagram	@nasyaar: "Film nirempati yang tidak berperspektif korban, jahat banget menunjukkan rekaman asli segala, emang harus menunjukkan kekerasan seksual dulu baru bisa merasakan sakitnya korban? Cuma mengeksploitasi derita doang."	Komentar tersebut membentuk diskursus kritis tentang kurangnya perspektif korban dan eksploitasi visual dalam penggambaran kekerasan seksual di film.	@nasyaar: "Film nirempati yang tidak berperspektif korban, jahat banget menunjukkan rekaman asli segala, emang harus menunjukkan kekerasan seksual dulu baru bisa merasakan sakitnya korban? Cuma mengeksploitasi derita doang."
		Komentar Sekunder 1	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi
		@anisyachair: "lu masih ngelindungi tersangka gitu dg	Komentar ini menunjukkan dukungan terhadap	Menunjukkan adanya dukungan terhadap film, dengan alasan

menutupi realnya. Bayangin keluarga lu yg alami”	upaya pengungkapan kebenaran melalui film sebagai bentuk perjuangan keadilan bagi korban yang selama ini tertutupi.	pengungkapan keadilan.
Komentar Sekunder 2	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi
@nasyaar: ‘Begini mbak anisya...kalau memang tujuannya untuk mengungkap, ya buat aja film dokumenter seperti ise cold! Kenapa malah bergenre horror dan lago-lagi gak perspektif korban? Artinya filmmakernya ceroboh dalam bernarasi dan justru malah mengeksploitasi derita korban....”	Komentar ini menunjukkan kritik terhadap genre horor dan narasi film yang dianggap tidak perspektif korban dan cenderung mengeksploitasi korban daripada mengungkap kebenaran secara empatik.	Menilai pemilihan genre horor sebagai bentuk penyampaian yang tidak tepat dan justru memperparah eksploitasi terhadap penderitaan korban.
Komentar Sekunder 3	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi
@endolita_endes: “@nasyaar ini setuju, kenapa adegan yang ga harus ditontonkan dilihat difilmkan, kalo masuk tv aja udah banyak adegan di sensor lah. Ini kekerasannya kelihatan jelas.	Komentar audiens lain juga menunjukkan persetujuan atas opini komentar primer bahwa film ini tidak layak untuk dipertontonkan.	Audiens merasa adegan kekerasan yang ditampilkan terlalu eksplisit dan tidak pantas untuk dikonsumsi publik, sehingga memperkuat kritik terhadap penggambaran visual yang tidak sensitif.
Komentar Sekunder 4	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi
@anisyachair: “menurut lu kalau dijadiin dokumenter apakah bisa viral? dan apakah semua akan bergerak dan bersatu memperjuangkan keadilan?” kayaknya engga sih	Komentar balasan ini masih memperjuangkan argumen bahwa dengan format dokumenter, tujuan film ini untuk mengungkap kasus yang terjadi tidak akan tercapai.	Audiens melihat dengan format populer seperti film horor lebih efektif dalam menarik perhatian publik dan membangun solidaritas dibandingkan dokumenter yang dianggap kurang menjangkau masyarakat.
Komentar Sekunder 5	Diskursus yang Terbentuk	Interpretasi



<p>@nasyaar: “bisalah, balik lagi liat aja itu film dokumenter kasus mirna, jadi di follow up lagi kasusnya. Rame juga kan yang nonton.”</p>	<p>Komentar menunjukkan adanya penjelasan secara rasional dengan memberikan contoh kasus dan film lain</p>	<p>Penggunaan konkret menunjukkan bahwa film dokumenter juga efektif dalam membangkitkan perhatian publik dan mendorong proses hukum.</p>
<p>Komentar Sekunder 6</p>	<p>Diskursus yang Terbentuk</p>	<p>Interpretasi</p>
<p>@anisyachair: “Makesense sebenarnya, tp ya apapun itu semoga ada keadilan untuk korban deh”</p>	<p>Audiens mulai bisa menerima komentar penjelasan yang disampaikan.</p>	<p>Menunjukkan sikap setuju dan mengutamakan tujuan akhir berupa tercapainya keadilan bagi korban, terlepas dari perbedaan pandangan sebelumnya.</p>

(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Dinamika diskursus publik yang terungkap dari analisis komentar di media sosial menggambarkan adanya perubahan persepsi masyarakat terhadap penggambaran kekerasan seksual dalam film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024). Pada awalnya, sebagian pengguna media sosial menunjukkan sikap kritis terhadap adegan kekerasan seksual yang dianggap dijadikan bahan candaan atau hiburan, mencerminkan kesadaran akan pentingnya memperlakukan isu ini dengan serius dan sensitif. Misalnya, komentar primer yang mengutuk normalisasi kekerasan seksual sebagai humor menandai adanya penolakan terhadap budaya yang meremehkan penderitaan korban. Namun, dalam interaksi selanjutnya, muncul komentar yang menunjukkan pergeseran sikap, di mana sebagian audiens mulai menerima atau bahkan menganggap wajar adegan tersebut sebagai bahan tertawaan. Hal ini mengindikasikan adanya proses negosiasi makna di antara publik, di mana persepsi awal yang kritis dapat mengalami perubahan atau bahkan kontras seiring dengan dialog dan tekanan sosial di ruang digital. Perubahan tersebut dapat terjadi karena publik menafsirkan dan menilai argumen untuk mencapai pemahaman bersama. Meski terjadi ketegangan dan polarisasi, komentar-komentar yang mempertimbangkan fakta dan logika menandai perkembangan diskursus menuju dialog yang lebih konstruktif.

Selain itu, perdebatan terkait genre film (horor *versus* dokumenter) memperlihatkan dinamika dalam cara pandang masyarakat mengenai strategi penyampaian isu kekerasan seksual. Beberapa berpendapat bahwa film horor dengan adegan eksplisit mampu lebih efektif menggerakkan perhatian publik dan solidaritas sosial, sementara yang lain menilai pendekatan tersebut berpotensi mengeksploitasi penderitaan korban dan mengabaikan perspektif empatik. Perdebatan ini tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan pendapat, tetapi juga refleksi mendalam mengenai bagaimana narasi media membentuk pemahaman dan sikap masyarakat terhadap isu tersebut. Proses diskursus yang berlangsung melibatkan saling memengaruhi dan pembentukan opini secara aktif, bukan sekadar penerimaan pasif. Pengguna media sosial mengajukan argumen, merespon kritik, dan terkadang merubah sikap setelah dialog berlangsung. Contohnya terlihat dalam dialog antara @anisyachair dan @nasyaar, yang awalnya berbeda pandangan namun kemudian mencapai kesepakatan untuk mengutamakan keadilan bagi korban sebagai tujuan utama, meskipun melalui cara penyajian yang berbeda.

Perubahan persepsi ini penting karena menunjukkan bahwa ruang digital berfungsi sebagai arena pembelajaran sosial dan pembentukan kesadaran kolektif yang terus

berkembang. Masyarakat tidak hanya menerima narasi media secara mentah, melainkan secara kritis menginterpretasi, menolak, atau mengadaptasi makna berdasarkan nilai dan pengalaman mereka sendiri. Dengan kata lain, dinamika ini menegaskan bahwa opini publik bersifat fleksibel dan dapat mengalami transformasi melalui interaksi sosial di ruang digital. Temuan ini memperkuat pandangan teori diskursus publik yang menyatakan bahwa diskursus publik adalah proses yang dinamis dan terbuka, di mana makna dan sikap masyarakat terus direkonstruksi melalui komunikasi, refleksi, dan negosiasi makna (Habermas, 1989). Kesadaran kritis terhadap isu kekerasan seksual yang semakin menguat merupakan hasil dari proses dialog tersebut, yang berpotensi mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Diskursus publik di media sosial terkait film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) menunjukkan adanya opini yang berbeda, khususnya dalam merespons isu kekerasan seksual. Media sosial seperti Instagram dan TikTok menjadi ruang publik digital tempat masyarakat menyuarakan pandangan, baik berupa dukungan, kritik, maupun candaan yang tidak sensitif. Temuan menunjukkan adanya komentar yang mengecam adegan kekerasan seksual dalam film serta perilaku penonton bioskop yang tidak empatik, dan komentar lain yang justru menyalahkan korban atau membuat candaan seksual. Selain itu, terdapat komentar yang menunjukkan bahwa film tersebut memiliki nilai edukasi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Hal ini memperlihatkan bahwa *rape culture* masih kuat dalam ruang digital Indonesia.

Selain perdebatan soal adegan kekerasan seksual, diskursus publik juga banyak menyoroti soal eksploitasi tragedi korban demi kepentingan komersial. Sebagian masyarakat menilai bahwa film ini hanya memanfaatkan kisah tragis korban untuk keuntungan semata tanpa memberikan pesan edukasi yang kuat. Argumen ini cukup beralasan mengingat minimnya narasi kritis yang dibangun dalam film terhadap budaya kekerasan seksual itu sendiri. Pertentangan opini ini menunjukkan bahwa ruang publik digital di Indonesia masih belum sepenuhnya menjadi ruang diskursus rasional seperti yang diidealkan Habermas (1989), melainkan lebih sering menjadi arena polarisasi opini. Temuan ini sejalan dengan penelitian Devasundaram & Barn (2020) serta Karupiah et al. (2020) yang menyoroti bagaimana film tanpa narasi kritis justru memperkuat budaya kekerasan. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya produksi film yang etis serta penguatan literasi digital agar ruang publik digital dapat menjadi arena diskusi yang sensitif, berpihak kepada korban, dan bebas dari bias gender.

Pembahasan mengenai dinamika diskursus publik terhadap penggambaran kekerasan seksual dalam film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) menunjukkan adanya perubahan opini audiens di media sosial, khususnya Instagram, meskipun belum mencapai *ideal speech situation* dan konsensus penuh seperti yang dijelaskan dalam teori Habermas (1989). Komentar-komentar publik memperlihatkan potensi terbentuknya konsensus melalui pertukaran argumen yang rasional dan terbuka, meski komunikasi belum sepenuhnya rasional (Juleha et al., 2024). Misalnya, diskursus di akun @nasyaar dan @anisyachair yang menunjukkan satu pihak menyoroti eksploitasi korban dan komersialisasi penderitaan, sementara pihak lain menekankan pentingnya penyebaran informasi untuk membangkitkan kesadaran dan menuntut keadilan. Proses saling menanggapi ini mencerminkan bagaimana masyarakat secara tidak langsung menguji *validity claims* kebenaran, ketepatan, dan ketulusan yang diuji melalui rasionalitas argumen dalam diskursus publik (Habermas, 1989). Meski terjadi ketegangan dan polarisasi, komentar-komentar yang mempertimbangkan fakta dan logika menandai perkembangan diskursus menuju dialog yang lebih konstruktif. Hal ini sejalan dengan temuan Ulfa et al. (2024) bahwa kesadaran sosial terhadap penggambaran kekerasan seksual semakin kritis dan reflektif, menuntut tanggung jawab industri perfilman dan perlindungan korban.

Selain itu, diskursus di media sosial merupakan arena penting bagi pembentukan opini kolektif yang dinamis dan multi dimensional, sebagaimana dikemukakan Suhendra & Pratiwi (2024). Mereka menunjukkan bagaimana kritik dan dukungan saling mempengaruhi,

membangun narasi kompleks yang merefleksikan struktur sosial, seperti budaya patriarki dan normalisasi kekerasan. Proses ini menggambarkan bahwa opini publik di ruang digital bukanlah entitas statis, melainkan bagian dari sistem interaktif yang terus berkembang. Diskursus publik mengenai film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) juga menunjukkan perbedaan mencolok antara Instagram dan TikTok karena perbedaan algoritma, audiens, dan bentuk interaksi. Di Instagram, diskursus cenderung lebih reflektif dan moralistik, dengan pengguna menyoroti kritik terhadap normalisasi kekerasan seksual sebagai bentuk kesadaran sosial, sebagaimana terlihat dari komentar yang mengecam tawa penonton pada adegan pemerkosaan. Sebaliknya, di TikTok, algoritma berbasis *For You Page* mendorong penyebaran opini yang cepat, emosional, dan sering kali reaktif; sebagian pengguna menilai film sebagai sarana edukatif, sementara lainnya menggunakan pendekatan empati emosional terhadap korban. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Instagram lebih membentuk ruang refleksi sosial, sedangkan TikTok menjadi arena reaksi spontan dan viral dalam membicarakan isu kekerasan seksual.

Namun, penerapan teori Habermas dalam konteks digital ini menghadapi keterbatasan, terutama terkait asumsi kesetaraan partisipasi dan bebas dari tekanan struktural. Seperti diungkapkan oleh Hamdani (2024), algoritma *platform* digital cenderung memperkuat opini mayoritas dan konten sensasional, sementara anonimitas dan performativitas identitas digital memengaruhi cara masyarakat terlibat dalam diskursus. Oleh karena itu, meskipun ruang publik digital menunjukkan potensi untuk diskursus rasional, praktiknya masih jauh dari ideal menurut Habermas (1989).

4 | SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa diskursus publik di media sosial mengenai film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) masih dibentuk oleh budaya patriarki yang tercermin dalam empat tema utama, yaitu *rape culture*, *victim blaming*, *objectification*, dan *gender power*. Temuan ini memperlihatkan bahwa ruang publik digital belum sepenuhnya menjadi tempat komunikasi yang ideal karena masih adanya pandangan yang menormalisasi kekerasan seksual dan merendahkan korban. Meskipun demikian, terdapat dinamika positif berupa munculnya upaya sebagian pengguna untuk mengedukasi publik dan membangun kesadaran terhadap pentingnya memahami kekerasan seksual dan nilai *consent*. Hal ini menandakan adanya potensi bagi ruang publik digital untuk berkembang menjadi wadah diskursus yang lebih adil, rasional, dan inklusif apabila didukung oleh literasi media dan kesadaran kolektif yang lebih baik.

Saran praktis adalah diperlukan peningkatan edukasi publik mengenai kekerasan seksual dan pentingnya *consent* melalui kampanye digital, pendidikan formal, serta kerja sama antara lembaga sosial dan media. Industri film terutama para sineas diharapkan lebih bertanggung jawab secara etis dalam menampilkan isu kekerasan seksual agar tidak sekadar menjadi komoditas hiburan, melainkan sarana refleksi sosial. Selain itu, *platform* media sosial perlu memperkuat regulasi untuk menekan penyebaran komentar yang bersifat pelecehan dan mendukung lingkungan diskusi yang sehat. Penelitian lanjutan dapat diarahkan untuk menelusuri dan mengukur dampak penggambaran kekerasan seksual dalam film, dan bagaimana film tersebut bisa memengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat dalam jangka panjang, terutama di kalangan remaja dan pengguna aktif media sosial. Selain itu, teori ruang publik Habermas (1989) perlu untuk ditinjau kembali berdasarkan asumsinya tentang komunikasi yang bebas dari dominasi. Penelitian ini menunjukkan rasionalitas komunikatif kini dipengaruhi oleh logika algoritma dan viralitas yang mempengaruhi dan mengarahkan arus diskursus. Kelemahan teori Habermas adalah masih menekankan pada kesetaraan partisipasi dan otonomi dalam proses komunikasi. Implikasi teoretisnya adalah perlunya memperluas konsep ruang publik agar mencakup dimensi teknologi dan kekuasaan algoritma.

REFERENSI

- Adolfsson, K. (2018). Blaming victims of rape: Studies on rape myths and beliefs about rape. *Göteborgs universitet*. <http://hdl.handle.net/2077/57769>
- Andina, T. (2023). Integrasi Perspektif Adil Gender dalam Pemberitaan Kekerasan Seksual. *Megashif.fisipol.ugm.ac.id*. [Diakses Tanggal 17 Oktober 2024] dari <https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/2023/01/30/integrasi-perspektif-adil-gender-dalam-pemberitaan-kekerasan-seksual/>.
- Arora, S. D., Singh, G. P., Chakraborty, A., & Maity, M. (2022). Polarization and social media: A systematic review and research agenda. *Technological Forecasting and Social Change*, 183, 121942. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121942>
- BBC.com. (2024). Film *Vina: Sebelum 7 Hari* menuai kontroversi di media sosial - Mengapa adegan kekerasannya tidak disensor?. *Bbc.com*. [Diakses Tanggal 20 September 2024] dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51n4e11gxro>
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2019). *Minding movies: observations on the art, craft, and business of filmmaking*. *University of Chicago Press*. <https://doi.org/10.7208/9780226067001>

- Cahyadi, I. (2020). Survei KIC: Hampir 60% Orang Indonesia Terpapar Hoax Saat Mengakses Internet. *Beritasatu.com*. [Diakses Tanggal 31 Oktober 2024]. <https://www.beritasatu.com/news/700917/survei-kic-hampir-60-orang-indonesia-terpapar-hoax-saat-mengakses-internet>
- Caputi, J. (2019). Is Seeing Believing? Rapist Culture on the Screen. *Analyzing Violence Against Women*, 207-223. doi.org/10.1007/978-3-030-05989-7_15
- Carr, C. T., & Hayes, R. A. (2015). Social media: Defining, developing, and divining. *Atlantic journal of communication*, 23(1), 46-65.
- Chandra, S. (2024). 10 Rekomendasi Film tentang Kekerasan Seksual, Ada Penyalin Cahaya. *Popmama.com*. [Diakses Tanggal 11 September 2024]. <https://www.popmama.com/life/relationship/sania-chandra/rekomendasi-film-tentang-kekerasan-seksual>
- Corbin, J., & Strauss, A. (2014). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory*. Sage publications.
- Danu, R (2024). Buzzer dan Simpang Siurnya Informasi Medsos. *Context.id*. [Diakses Tanggal 6 November 2024] dari <https://context.id/read/1780/buzzer-dan-simpang-siurnya-informasi-medsos>
- Devasundaram, A. I., & Barn, R. (2020). Performativity of rape culture through fact and fiction: An exploration of India's daughter and anatomy of violence. *International Journal of Cultural Studies*, 23(6), 879-897. <https://doi.org/10.1177/13678779209119>
- Effendy, R., Damayanti, M. A., Widayati, S., & Setyaningsih, L. A. (2024). Mendambakan Kecantikan Ideal Sebagai Penindasan: Analisis Resepsi Iklan ImPerfect Beauty Elshe Skin. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 6(1), 169-181.
- Effendy, A. R., Octaviano, A. L., & Saryana, I. M. (2022). Representasi Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Fotografi Editorial. *Retina Jurnal Fotografi*, 2(2), 164-173.
- Foucault, M. (2019). *The history of sexuality: An introduction, volume I*. Trans. Robert Hurley. New York: Vintage, 95, 1-160.
- Fuchs, C. (2021). *Social media: A critical introduction*
- Gill, R. (2008). Empowerment/sexism: Figuring female sexual agency in contemporary advertising. *Feminism & psychology*, 18(1), 35-60.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. 1962. Trans. Thomas Burger and Frederick Lawrence. Cambridge, Mass.
- Hamdani. (2024). Fenomena Buzzer: Kekuatan dan Kontroversi di Era Media Sosial. *Wartamu.id*. [Diakses Tanggal 6 November 2024] dari <https://www.wartamu.id/fenomena-buzzer-kekuatan-dan-kontroversi-di-era-media-sosial/>
- Hargens, B. (2021). Kritik dan Ruang Publik. *Kompas.id*. [Diakses Tanggal 9 September 2024]. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/11/04/kritik-dan-ruang-publik>
- Indainanto, Y. I. (2020). Normalisasi kekerasan seksual wanita di media online. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 105-118
- Juleha, J., Yuniar, J., & Marsuki, N. R. (2024). Peran media sosial dalam dinamika opini publik dan partisipasi politik era digital. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(1), 38-45.
- Karupiah, P., Pathmanathan, S., & Nikku, B. R. (2022). Perception of sexual violence in Tamil movies by Malaysian Indian viewers. *Feminist Media Studies*, 22(3), 536-551. <https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1850501>
- Kurniawan, R., Setyaningsih, L. A., & Sofyan, I. (2022). Islamic Boarding School Journalism As a Way of Strengthening Literacy Culture. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 15(1), 41-54.
- Komnas Perempuan (2023). CATAHU2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. *Komnas Perempuan*. [Diakses tanggal 22 Maret 2024] dari <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara->

- minimnya-perlindungan-dan-pemulihan
- Krijnen, T., & Van Bauwel, S. (2021). *Gender and media: Representing, producing, consuming*. Routledge.
- Layman, K. E. (2020). The representation of rape and sexual assault within news media. *Portland State University*
- Lazar, M. M. (2014). Feminist critical discourse analysis. *The handbook of language, gender, and sexuality*, 180-199.
- McCombs, M., & Valenzuela, S. (2020). *Setting the agenda: Mass media and public opinion*. John Wiley & Sons.
- Mears, A. (2023). Bringing Bourdieu to a content farm: Social media production fields and the cultural economy of attention. *Social Media+ Society*, 9(3), 20563051231193027.
- Medvi, A., & Syahminan, M. (2024). Strategi Komunikasi Dan Penanggulangan Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial Tiktok. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 8(1).
- Papacharissi, Z. (2015). *Affective publics: Sentiment, technology, and politics*. Oxford University Press.
- Pertiwi, S. (2024). Segudang Masalah Film 'Vina: Sebelum 7 Hari', Darurat Etika dan Perspektif Korban. *Konde.co*. [Diakses Tanggal 17 September 2024] dari <https://www.konde.co/2024/05/segudang-masalah-film-vina-sebelum-7-hari-darurat-etika-dan-perspektif-korban/>
- Permatasari, M. S., & Amalia, D. (2022). Penyintas kekerasan seksual dalam film penyalin cahaya. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian*, 8(2), 925-944.
- PLAN International. (2019). *Rewrite Her Story*. Geena Davis Institute.
- Popova, M. (2019). *Sexual consent*. MIT Press.
- Powell, A., & Henry, N. (2017). *Sexual violence in a digital age (Vol. 25)*. London: Palgrave Macmillan.
- Razali, G., & Oktaviana, D. (2023). Radical feminist representation, social cognition, and film communication on reducing sexual harassment. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 9(2), 245-258. <http://dx.doi.org/10.30813/bricolage.v9i2.3868>
- Salahuddin, S. P. (2024). *Komunikasi dalam Organisasi Multikultural*. Penerbit Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2.
- Schwark, S. (2017). Visual representations of sexual violence in online news outlets. *Frontiers in psychology*, 8, 774. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00774>
- Studzińska, A. (2015). Gender differences in perception of sexual harassment. (*Doctoral dissertation, Université Toulouse le Mirail-Toulouse II*). theses.hal.science/tel-01320713
- Suhendra, S., & Pratiwi, F. S. (2024, October). Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini Publik: Studi Kasus Media Sosial. *In Iapa Proceedings Conference* (pp. 293-315).
- Sunstein, C. (2018). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton university press.
- Tannen, D., Hamilton, H. E., & Schiffrin, D. (2015). *The handbook of discourse analysis*. John Wiley & Sons.
- Tuhepaly, N. A. D., & Mazaid, S. A. (2022). Analisis semiotika John Fiske mengenai representasi pelecehan seksual pada film Penyalin Cahaya. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 5(2), 233-247.
- Ulfa, A. M., Jayus, M., Sofiana, A., & Febriani, E. (2024). Berkomunikasi Melalui Media Sosial Berbasis Nilai Moralitas. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 1077-1089.
- Vance, K., Sutter, M., Perrin, P. B., & Heesacker, M. (2015). The media's sexual objectification of women, rape myth acceptance, and interpersonal violence. *Journal of aggression, maltreatment & trauma*, 24(5), 569-587.
- World Health Organization. (2012). Sexual Violence. *iris.who.int*. [Diakses Tanggal 20 Desember 2024] dari <https://iris.who.int/bitstream/handle/>

